

Redam Isu Pengondisian Proyek, ULP Aceh Didesak Transparan Rampungkan Tender RSUD Yulidin Away

Category: ACEH

written by Redaksi | June 28, 2026

Pengumuman			
Peserta			
Hasil Evaluasi			
Pemenang			
Pemenang Berkontrak			
Kode Tender	10138106000		
Nama Tender	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional dr.Yulidin Away Tapaktuan		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	66363090	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional dr.Yulidin Away Tapaktuan	APBD
Uraian Singkat Pekerjaan	URAIAN SINGKAT SPSEPK RSRRYA2026.pdf		
Tanggal Pembuatan	20 Mei 2026		
Tahap Tender Saat Ini	Pengumuman Pemenang		
K/L/PD/Instansi Lainnya	Aceh		
Satuan Kerja	Dinas Kesehatan Aceh		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction		
Tahun Anggaran	APBD 2026		
Nilai Pagu Paket	Rp. 13.801.851.250,00	Nilai HPS Paket	Rp. 13.801.849.000,00
Jenis Kontrak	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan - Aceh Selatan (Kab.)		
Kualifikasi Usaha	Kecil		

SEANTERONEWS.com – Lembaga swadaya masyarakat Transparansi Tender Indonesia (TTI) secara resmi mendesak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, untuk turun tangan mengawasi kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh. Langkah pengawasan langsung ini dinilai krusial guna memastikan ketepatan jadwal evaluasi serta penetapan pemenang lelang proyek lanjutan pembangunan Rumah Sakit Regional Yulidin Away Tapaktuan di Kabupaten Aceh Selatan.

Desakan ini disuarakan TTI mengingat jadwal penetapan pemenang yang seharusnya diumumkan pada Sabtu (27/6/2026) dilaporkan belum menunjukkan tanda-tanda rampung hingga akhir pekan ini.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengingatkan pemerintah

daerah agar tidak mengulang kesalahan tata kelola administrasi lelang seperti yang terjadi pada Tahun Anggaran 2025 lalu.

Pada tahun lalu, proyek lanjutan pembangunan RSUD-YA Tapaktuan sebenarnya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar. Anggaran tersebut bahkan sudah disetujui dan disahkan sejak Januari 2025. Namun, proyek strategis tersebut akhirnya batal terlaksana akibat lambannya proses tender yang baru digulirkan di pengujung tahun anggaran.

“Keterlambatan lelang tahun lalu menyisakan waktu yang sangat sempit. Begitu ada peserta yang mengajukan sanggah banding, sisa waktu pengerjaan tidak lagi mencukupi, sehingga tender terpaksa dibatalkan,” jelas Nasruddin pada Sabtu (27/6/2026). Akibat penundaan administrasi oleh [ULP](#) tersebut, masyarakat Aceh Selatan dan daerah dirugikan karena kehilangan hak akses fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Nasruddin menambahkan bahwa pola penundaan pengumuman seperti saat ini berisiko melahirkan opini negatif dan mencederai kepercayaan publik terhadap kinerja ULP serta Pemerintah Provinsi Aceh.

Lebih lanjut, TTI menyoroti adanya kekhawatiran publik mengenai integritas proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE). Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pelaku usaha bahwa paket-paket proyek berskala besar kerap dicurigai telah diatur atau diarahkan kepada pihak-pihak tertentu jauh-jauh hari sebelum lelang resmi dibuka.

“Jika proses penawaran di LPSE hanya dijadikan sebagai formalitas administratif semata, maka kelompok kerja (Pokja) pemilihan akan dengan mudah mencari-cari kesalahan subjektif demi mengeliminasi penyedia jasa yang tidak dikehendaki,” cetus Nasruddin.

TTI menilai paradigma berpikir masyarakat Aceh saat ini sudah jauh lebih kritis dan cerdas dalam mengawal jalannya pemerintahan. Publik tidak akan dengan mudah menerima alasan-

alasan administratif yang dibuat-buat hanya untuk menutupi kelemahan kinerja pejabat pengadaan.

“Pola-pola pembenaran sepihak ala dongeng Abu Nawas sudah tidak relevan lagi untuk digunakan hari ini,” tambahnya.

TTI memperingatkan bahwa apabila jadwal penetapan pemenang proyek RSUD-YA Tapaktuan ini kembali diundur dengan dalih perpanjangan masa evaluasi, maka asumsi publik mengenai adanya intervensi faktor non-teknis (luar tender) akan semakin menguat. Oleh sebab itu, pengawasan ketat dan ketegasan dari Gubernur H. Muzakir Manaf sangat dinantikan agar sisa waktu pelaksanaan fisik proyek di tahun 2026 ini tidak terbuang sia-sia.